

TINJAUAN SOLUTIF: DISPARSITAS DAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN KEJURUAN

Faizal Amir, Yasdin

faizalamir64@gmail.com , yasdin@unm.ac.id

Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Otonomi daerah menjadikan tiap daerah sebagai tonggak pembangunan. Otonomi daerah harus menggenjot pembangunan sumber daya manusia. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah membenahi sistem pendidikan daerah tapi tetap sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Pendidikan kejuruan sebagai bagian sistem pendidikan yang harus dipikirkan masing-masing daerah untuk dikembangkan di era otonomi daerah. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan kejuruan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Sumber daya manusia yang andal akan mengatasi persoalan disparitas (kesenjangan) antardaerah dan antarmanusia.

Kata kunci: Pendidikan kejuruan, disparitas, sumber daya manusia

Abstract

Regional autonomy makes each area as a milestone development. Regional autonomy should boost the development of human resources. One of the efforts that must be done is to fix the education system of the area but still in accordance with the ideals of national education. Vocational education as part of the education system to think about each of these areas to be developed in the era of regional autonomy. Human resource development through vocational education can be done in accordance with the potential of each area. Human resources will reliably overcoming disparitas (gap) between regions and between people.

Keywords: vocational education, disparitas, human resources

PENDAHULUAN

Saat ini, di era demokrasi, Indonesia menganut desentralisasi. Perencanaan pembangunan tidak lagi dilaksanakan secara mutlak oleh pemerintah pusat. Desentralisasi diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan sinergis. Pemerintah pusat memiliki hak dalam mengatur *master plan* pembangunan Indonesia. *Master*

plan pembangunan Indonesia harus didukung oleh perencanaan yang sinergis dari pemerintah daerah karena kebijakan yang kontradiktif antara pusat dan daerah akan menghambat laju pembangunan dan dapat menyebabkan disparitas antarmanusia dan antardaerah. Prinsip otonomi daerah dilakukan pada semua aspek pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia lokal.

Pendidikan kejuruan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia memiliki tanggungjawab besar untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dan sumber daya manusia lokal yang berdaya saing global. Sumber daya manusia yang harus dikembangkan harus memiliki kualitas dasar dan kualitas instrumental yang kuat (Slamet, 2008). Kualitas dasar meliputi daya pikir, daya kalbu, dan daya fisik. Kualitas instrumental meliputi kemampuan produktif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama, kemampuan menggunakan data dan informasi, kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Slamet, 2014). Seluruh kemampuan ini merupakan kemampuan yang dituntut dan dipersyaratkan di abad 21 dan masa yang akan datang.

Lebih spesifik, sumber daya manusia lokal harus memiliki empat kemampuan yaitu: a) kemampuan individu, b) kemampuan metodologis, c) kemampuan sosial dan d) kemampuan profesional. Kemampuan-kemampuan itu dibutuhkan untuk mengembangkan pribadi-pribadi baik dari aspek kognitif dan afektif maupun pada aspek psikomotorik. Hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosiologis individu.

Hal seperti ini harus ditekankan pada perancangan pola pendidikan kejuruan tingkat menengah pada daerah-daerah yang mengalami dispersitas karena pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang menempa sikap, kemampuan, dan kebiasaan peserta didik sebelum terlibat langsung pada dunia kerja yang berguna bagi masa depan diri, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Dispersitas yang banyak disebabkan oleh kemiskinan dan pengangguran dapat dijawab dengan pendidikan kejuruan karena pendidikan kejuruan akan menempa keterampilan untuk mencari pekerjaan (Hansen, 2009). Hal itu membutuhkan pemetaan yang ril.

Pemetaan yang dilakukan meliputi potensi Sumber Daya Alam (SDA) berdasarkan profil daerah. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi daerah tetapi memiliki daya saing global. Pengembangan sumber daya manusia lokal juga harus disesuaikan dengan konteks budaya lokal dan perkembangan masyarakat atau sumber daya manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan terhadap daerah.

Pemetaan yang dilakukan untuk memperkuat kemampuan adaptif dan mengembangkan kemitraan dengan industri sesuai dengan potensi daerah. Hal ini dilakukan untuk menguatkan daya saing sekolah dan daya serap lulusan. Hal ini merupakan pertimbangan ekonomi pendidikan kejuruan. Argumentasi ini menguatkan secara pragmatis bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang bernilai ekonomi (Sudira, 2012). Pendidikan kejuruan diarahkan untuk menempa pengetahuan, kemampuan, sikap, dan memberikan nilai untuk bekerja pada pekerjaan tertentu (Lomovtseva, 2014; Edmond & Oluyi, 2014).

Pendidikan kejuruan merupakan upaya mewujudkan peserta didik menjadi manusia produktif untuk mengisi kebutuhan terhadap peran-peran yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. Pendidikan kejuruan difokuskan pada penyediaan tenaga

kerja terampil pada berbagai sektor seperti perindustrian, pertanian dan teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi (Afwan, 2013). Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan, dan pengangguran. Bekerja dan sukses pada pekerjaan yang diinginkan sesuai dengan alasan vokasionalisasi yakni tujuan pengembangan individu, tujuan sosiopolitik, dan tujuan ekonomi (Lauglo, 2005) oleh karena itu pendidikan kejuruan akan berhasil jika mampu mengembangkan budaya berkarya/kerja, budaya belajar dan budaya melayani (Sudira, 2011).

Pada semua tatanan pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh kelompok kepentingan dalam perumusan kebijakan pendidikan kejuruan seperti legislatif, eksekutif, dunia usaha/ dunia industri, masyarakat baik orang tua maupun lembaga swadaya masyarakat, pelibatan sekolah.

Keterlibatan kelompok kepentingan diarahkan untuk: a) menentukan standar pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyelaraskan kurikulum industri dan sekolah melalui aturan yang dimediasi eksekutif dan legislatif, c) memaksimalkan peran industri dan pemerintah untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu dilakukan agar persetujuan pada semua aspek materi usulan kebijakan dapat terpenuhi. Aspek materi yang dimaksud meliputi: a) kerjasama pendidikan dan latihan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), b) biaya praktik dan uji kompetensi, c) kurikulum diklat berbasis DUDI, d) upaya membuka

lapangan kerja sesuai dengan potensi daerah, jenis dan jumlah program keahlian sesuai dengan permintaan pasar kerja dan e) pembentukan atau ada perwakilan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).

Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengembangkan standar nasional pendidikan kejuruan yang lebih terukur. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah membuat ukuran standar yang dikembangkan dari hasil kajian awal *benchmark* nasional. Penetapan dan pengembangan standar nasional akan berkontribusi pada pemerataan dan akses pendidikan. Pada tingkatan yang lebih kecil seperti kabupaten/kota diperlukan pemetaan yang lebih mikro terkait dengan kondisi daerah yang meliputi, a) profil daerah dan unit layanan, b) kondisi sebelum adanya inovasi, c) praktik inovasi pendidikan, d) kapabilitas inovasi, keberlangsungan program. Pemetaan ini akan berdampak pada kualitas manusia yang dihasilkan, semakin baik analisis dan pemetaan yang dilakukan maka akan semakin baik program yang dihasilkan, semakin baik program yang dihasilkan maka akan semakin baik pula kualitas manusia yang dihasilkan.

Kualitas manusia yang baik akan berkontribusi pada daerah yang mengalami disparitas. Kualitas manusia yang baik akan menguatkan pilar pendidikan dalam hal, a) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing dan c) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Kuatnya pilar pendidikan melalui pendidikan kejuruan akan menguatkan daerah.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan maka langkah teknis yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah adalah a) membuat proposal pendirian sekolah yang memuat, 1) latar belakang dan tujuan pendirian sekolah, 2) bentuk dan nama sekolah, 3) lokasi sekolah dan dukungan masyarakat, 4) sumber peserta didik, 5) guru dan tenaga kependidikan, 6) sumber daya, 7) fasilitas lingkungan dan 8) peta pendidikan dan hasil studi kelayakan yang meliputi kelayakan hukum, kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, dan kelayakan operasi. b) menyusun rencana induk pengembangan sekolah yang memuat, 1) visi dan misi, 2) kurikulum, 3) peserta didik, 4) ketenagaan, 5) sarana dan prasarana, 6) organisasi, 7) Pembiayaan, 8) manajemen sekolah, 9) peran serta masyarakat, dan 10) rencana pelaksanaan. c) sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan nonkependidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal, d) menggunakan kurikulum yang berlaku, e) sumber pembiayaan dan f) sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal.

Peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh kelompok kepentingan dalam perumusan kebijakan pendidikan kejuruan seperti legislatif, eksekutif, dunia usaha/ dunia industri, masyarakat baik orang tua maupun lembaga swadaya masyarakat, pelibatan sekolah. Keterlibatan kelompok kepentingan diarahkan untuk, menentukan standar pendidikan, menyelaraskan kurikulum industri dan sekolah melalui aturan yang dimediasi eksekutif dan legislative serta memaksimalkan peran industri dan pemerintah untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan.

Pengembangan pendidikan kejuruan seharusnya memperhatikan empat hal : (a) hubungan industri, (b) perubahan teknologi, (c) organisasi pekerjaan, dan (d) formasi kompetensi dan keempat komponen tersebut harus saling berinteraksi (Field, 1990).

Kualitas pendidikan kejuruan yang tinggi akan mampu menjawab kepentingan dan tantangan global. Era *Asean Economy Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan menjadi tantangan awal bagi pendidikan kejuruan. Pasar bebas 2020 adalah target kedua yang menjadi sasaran sela bagi sumber daya manusia pendidikan kejuruan Indonesia sebelum 2045 atau Indonesia Emas.

Pada dasarnya Indonesia telah menyiapkan diri untuk menghadapi pasar bebas 2020. Ketersediaan sumber daya manusia yang tergolong banyak, Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah, serta upah tenaga kerja yang terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun, jika potensi tersebut tidak dikelola dengan baik maka bisa dipastikan Indonesia tidak akan mampu menghadapi pasar bebas 2020. Sumber daya manusia sebagai subjek yang akan ikut bersaing harus segera dimatangkan. Dunia abad 21 sebagai dunia yang terbuka membutuhkan sumber daya manusia yang kompetitif (Tilaar, 2009).

SDA yang melimpah ruah tidak akan berguna jika tidak dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Kondisi akan lebih parah jika SDA Indonesia di era pasar bebas dikelola oleh tenaga kerja asing yang kurang memahami kondisi sosial, kultur, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Meski merupakan era globalisasi, namun bangsa Indonesia tetap harus kompetitif dalam persaingan

pasar global. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan berperan besar dalam mengatasi pengangguran yang berpotensi menimbulkan dispersitas melalui penyiapan sumber daya manusia yang andal.

KESIMPULAN

Kualitas sumber daya manusia lokal dan Indonesia harus memiliki daya saing global. Daya saing global sumber daya manusia Indonesia harus diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Kualitas andal sumber daya manusia Indonesia akan mampu mengatasi dispersitas yang dialami oleh daerah-daerah tertentu di era otonomi daerah. Pendidikan kejuruan sebagai pendidikan yang berorientasi dunia kerja akan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia global yang mampu mengatasi dispersitas daerah karena pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang menempa sikap dan keterampilan untuk bekerja pada sektor pekerjaan tertentu.

Dispersitas yang timbul karena pengetahuan dan keterampilan akan diatasi dengan pendidikan kejuruan. Kebijakan alternatif pendidikan kejuruan diharapkan mampu mengatasi problematika pendidikan kejuruan yang berimplikasi pada lapangan kerja, pengangguran, kesenjangan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan gejolak sosial (Yahya & Yasdin, 2014) sebagai akibat dari dispersitas. Pendidikan kejuruan bertanggungjawab untuk menyiapkan lulusannya yang mampu dan mau bekerja sesuai dengan bidang keahliannya (Usman, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, M. (2013). Leadership on technical and vocational education in community college [Versi elektronik]. *Journal of Education and Practice*, Vol 4, No 21, 21-23.
- Edmon, A., & Oluniyi, A. (2014). Re-engineering technical vocational education and training toward safety practice skill needs of sawmill workers against workplace hazards in Nigeria [Versi elektronik]. *Journal of Education and Practice*, Vol 5, No 7, 150-157.
- Field, L. (1991). *Skilling Australia*. Melbourne : Longman Cheshire.
- Hansen, R. (2009). The Pedagogical Roots of Tehcnical Learning and Thinking. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.). *International Handbook of Education for The Changing World of Work. Bridging Academic and Vocation Learning* (pp. 5-18). Germany: Springer.
- Lauglo, J., & Maclean, R. (2005). *Vocationalisation of secondary education revisited*. Netherlands: Springer.
- Lomovtseva, N.V. (2014, Mei). *Roles of VET in generating a new entrepreneur increative economy sector*. Makalah disajikan dalam 3rd international conference on vocational education and training (ICVET), di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Slamet. (2008). *Handout 2: desentralisasi pendidikan di*

Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Slamet. (2014). *Pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif global*. Materi kuliah.

Sudira, P. (2011). *Praksis ideologi tri harta karana dalam pembudayaan kompetensi pada SMK Di Bali*. Disertasi doktor, tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Sudira, P. (2012). *Filosofi & teori pendidikan vokasi dan kejuruan*. Yogyakarta : UNY Press.

Sunarto. (2011). *Analisis kebijakan pendidikan kejuruan dan pelatihan berbasis dunia usaha dunia industri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Disertasi doktor, tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Tilaar, H.A.R. (2009). *Membenahi pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Usman, H. (2012). *Kepemimpinan pendidikan kejuruan*. Yogyakarta: UNY Press.

Yahya, M. & Yasdin. (2014). *Patterns of Partnerships Vocational Education in The Era of Decentralization*. Makalah disajikan dalam Aptekindo TVET, di Universitas Pendidikan Bandung.